



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

A light brown outline map of the Indonesian archipelago is centered in the white section of the cover. The title text is overlaid on the map.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Materi Pelatihan Bagi Peserta Diklat "Pengelolaan Keuangan Daerah"
Edisi Tahun 2014

Materi Pelatihan

BAB IV

BARANG MILIK DAERAH

DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Edisi Tahun 2014



KATA SAMBUTAN

Kapasitas sumber daya manusia yang andal di seluruh pemerintah daerah merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman para aparat pengelolaan keuangan daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) -Kementerian Keuangan sejak tahun 1981/1982 telah menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah (KKD).



Sementara itu, kegiatan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK) diselenggarakan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, KKD dan KKDK dikerjasamakan dengan 7 perguruan tinggi negeri (selanjutnya dikenal dengan sebutan *center of excellences*), yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas (Unand), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Pelaksanaan KKD-KKDK terus mengalami penyempurnaan dan *updating* terutama terkait dengan kurikulum, satuan acara pembelajaran (SAP), dan modul. Pada tahun 2012, modul-modul kegiatan KKD-KKDK diseragamkan agar setiap lulusan mempunyai pemahaman yang sama atas materi yang diajarkan. Seiring dengan adanya transformasi kelembagaan DJPK dimana salah satu pilarnya adalah transformasi KKD/KKDK, maka perbaikan kualitas pelaksanaan KKD-KKDK terus dilanjutkan dan pada tahun 2014, DJPK mendapat dukungan dari *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)* untuk melakukan *updating* modul sekaligus menyesuaikannya menjadi modul terintegrasi yang nantinya akan dilakukan penjenjangan dari tingkat dasar (*basic*), menengah (*intermediate*), lanjutan (*advance*) dan *executive*. Hal tersebut dimaksudkan agar aparaturnya pengelola keuangan daerah dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam tahun 2015, akan diselenggarakan *In-House Training (Levelling end user training)* bekerjasama dengan 34 Badiklat Provinsi. Dalam rangka menunjang *In-House Training* tersebut, DJPK akan menyelenggarakan ToT Master Trainer dan ToT Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar baik di internal Kemenkeu maupun melibatkan wakil dari PTN yang tersebar di 34 provinsi.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)* dan mitra pelaksana AIPD yang telah mendukung pelaksanaan standarisasi materi pelatihan pengelolaan keuangan daerah ini. Kami berharap output dari modul integrasi ini akan memudahkan peserta dalam memahami pengelolaan keuangan daerah sehingga akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah ke depan. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun modul, pimpinan dan pengurus *center* penyelenggara kegiatan diklat pengelolaan keuangan daerah serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan standarisasi materi pelatihan pengelolaan keuangan daerah ini.

Diharapkan dengan kehadiran modul yang telah distandarisasi ini akan meningkatkan kualitas pemahaman seluruh stakeholder khususnya yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan daerah. Ke depan, modul terintegrasi ini dapat terus diupdate dan terjaga kualitasnya dengan baik serta juga memudahkan para pelatih dan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan daerah dapat berkontribusi pada perwujudan tatalaksana pemerintahan yang baik, sehingga menghasilkan kebijakan dan layanan publik yang berkualitas tinggi.

Jakarta, November 2014

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E

NIP. 19580823 198210 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Sambutan	ii
Halaman Sub Judul	iii
Tim Penyusun/Editor	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi

PENDAHULUAN

A. Abstraksi	1
B. Latar Belakang	1
C. Tujuan Instruksional Umum	2
D. Metode Pembelajaran	2
E. Perlengkapan dan Fasilitas Pelatihan	3
F. Evaluasi Pelatihan	3
G. Sertifikat Pelatihan	3

TOPIK 1 PENGANTAR: PENGERTIAN, PARADIGMA DAN REGULASI BARANG MILIK NEGARA

1. Pengertian	7
2. Paradigma Pengelolaan Barang Milik Daerah	9
3. Regulasi Barang Milik Daerah	10
4. Rangkuman	12
5. Latihan	12

TOPIK 2 ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Pendahuluan	15
2. Struktur Kelembagaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	16
3. Tugas dan Wewenang Pihak-pihak yang Melaksanakan Pengelolaan Barang	17
4. Rangkuman	20
5. Latihan	20

TOPIK 3 PENGANTAR PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA

1. Perencanaan dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Daerah	23
2. Alur Proses Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	24
3. Rangkuman	33
4. Latihan	33
Studi Kasus Perencanaan Aset Daerah	34

TOPIK 4 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Definisi dan Prinsip Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)	39
2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	40
3. Jenis Pengadaan BMD	43

3.1	Melalui Swakelola	43
3.2	Melalui Penyedia Barang/Jasa	43
4.	Tatacara Pelaksanaan Pengadaan BMD	45
5.	Pengadaan Tanah	46
6.	Pertimbangan dalam Pengadaan BMD	47
7.	Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah	47
8.	Rangkuman	48
9.	Latihan	48
TOPIK 5	PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	49
1.	Penggunaan Barang Milik Daerah	51
2.	Pemanfaatan Milik Daerah	53
2.1	Definisi, Prtimbangan, dan Pelaksana	53
2.2	Bentuk-bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah	53
3.	Rangkuman	59
4.	Latihan	59
TOPIK 6	PENGAMANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	61
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)	63
1.1	Konsep Pengadaan BDM	63
1.2	Ruang Lingkup Pengamanan BMD	63
1.3	Prosedur Pengamanan BMD	63
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	65
2.1	Tujuan Pemeliharaan BMD	65
2.2	Rencana Pemeliharaan Barang	65
2.3	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66
2.4	Biaya Pemeliharaan Brang Milik Daerah	66
3.	Rangkuman	68
4.	Latihan	68
TOPIK 7	PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	69
1.	Pendahuluan	71
2.	Penilaian Barang Milik Daerah	73
2.1	Penilaian dalam Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah	73
2.2	Pengertian Penilaian	73
2.3	Pendekatan Nilai Wajar	83
3.	Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah	85
4.	Ketentuan Khusus Oenilaian Barang Milik Daerah	85
5.	Penilaian Kembali	85
6.	Illustrasi Penilaian Barang Milik Daerah (BMD)	86
7.	Rangkuman	89
8.	Latihan Soal Penilaian Barang Milik Daerah	89
TOPIK 8	PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH	89
1.	Definisi Pemindahtanganan	92
2.	Cara Pemindahtanganan	94
3.	Laporan Pemindahtanganan	107
4.	Rangkuman	107

5. Latihan	107
TOPIK 9 PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH	109
1. Pendahuluan	111
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab terkait Pemusnahan BMD	111
3. Tatacara Pemusnahan BMD	111
4. Rangkuman	112
5. Latihan	112
TOPIK 10 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	114
1. Pendahuluan	115
2. Dasar Penghapusan BMD	115
3. Wewenang Penghapusan Barang Daerah	116
4. Kewajiban Pelaporan	116
5. Proses Penghapusan Barang Milik Daerah	116
6. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah	117
7. Pelaksanaan Penghapusan Secara Khusus	117
8. Rangkuman	117
9. Latihan	118
TOPIK 11 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	120
1. Pengertian Penatausahaan Barang Milik Daerah	122
2. Sasaran Penatausahaan BMD	122
3. Tujuan Penatausahaan Barang Milik Daerah	123
4. Pembukuan Barang Milik Daerah	124
5. Investasi Barang Milik Daerah	124
5.1 Peranan dan Fungsi Inventaris Barang Milik Daerah	124
5.2 Sasaran Inventaris atas Barang/Barang Milik/Kekayaan Daerah	125
5.3 Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah	126
5.3.1 Sensus Barang Milik Daerah	127
5.3.2 Penggolongan Barang Milik Daerah	138
6. Pelaporan	153
7. Rangkuman	158
8. Soal Latihan	158
TOPIK 12 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK	159
1. Pendahuluan	161
2. Konsep Pembinaan BMD	162
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengawasan dan Pengadilan	163
4. Prosedur Pengawasan dan Pengendalian BMD	163
5. Rangkuman	164
6. Latihan	165
TOPIK 13 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH	166

1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah	168
2.	Pengelolaan BMD Berupa Rumah Negara	169
2.1	Definisi dan Landasan Hukum	169
2.2	Pengadaan, Penetapan Status dan Penggolongan, Serta Perutukan Rumah Negara	170
2.3	Pendaftaran Rumah Negara	171
3.	Rangkuman	178
4.	Latihan	178

PENDAHULUAN

A. Abstraksi

Modul ini berisi mengenai konsep, teori, penjelasan perundangan, serta aspek teknis penyusunan dokumen perencanaan dan Perencanaan dan Penganggaran daerah di Indonesia. Modul ini juga memuat berbagai macam dasar dan kondisi kelembagaan negara yang terkait dalam proses perencanaan dan penganggaran. Konsep pembangunan yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai penganggaran sangat diperlukan oleh aparat pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tupoksi dan peraturan yang telah ditentukan dalam perundangan.

Modul ini terdiri dari 4 bab, sebagai topik bahasan dengan 22 sub topik bahasan. Topik disusun secara sistematis dimulai dari konsep dasar dan filosofi pengelolaan negara dalam konteks pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan diakhiri pada pengetahuan teknis yang harus dipahami oleh setiap aparat pemerintah.

Modul dimulai dengan pendahuluan pada bab pertama berisi abstraksi, latar belakang, tujuan instruksional umum, serta metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam pelatihan, sebagai pengantar dan petunjuk bagi pengguna modul. Bab kedua, membahas hubungan antara pusat dan daerah, meliputi hubungan kewenangan antar tingkat pemerintah, hubungan keuangan antar tingkat pemerintah, isu desentralisasi fiskal, struktur dan hubungan antara APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana urusan bersama. Bab kedua adalah dasar penting dan merupakan kerangka acuan bab selanjutnya.

Pada bab ketiga, dibahas pengertian konsep dan prinsip perencanaan daerah dan penyusunan dokumen perencanaan. Pembahasan mencakup juga mekanisme perencanaan, indikator kinerja pembangunan dan panduan untuk menyusun rencana pembangunan daerah (Renstra dan Renja SKPD). Pada bagian akhir bab ini menyediakan studi kasus perencanaan pembangunan sebagai bahan pembelajaran keberhasilan dari proses perencanaan daerah.

Penganggaran daerah selanjutnya dibahas pada bab 4. Bab ini adalah kelanjutan dari proses perencanaan. Pada bagian ini pembahasan dimulai dari keterkaitan antara perencanaan anggaran, kerangka pengeluaran jangka menengah serta penyusunan anggaran belanja. Selanjutnya sub topik penyusunan anggaran juga dibahas secara lebih mendalam dan teknis pada penyusunan anggaran SKPD dan anggaran kas. Bagian ini diakhiri dengan studi kasus penganggaran SKPD sebagai bahan untuk memahami kegiatan penganggaran secara terpadu dan terperinci.

Bab 5 membahas secara khusus mengenai pembiayaan daerah yang meliputi berbagai macam jenis dan sumber pembiayaan yang memungkinkan dan sah bagi daerah. Selain itu upaya pemerintah untuk menggali sumber dana masyarakat melalui berbagai macam kerja sama juga dibahas dalam sub topik berikutnya. Bahasan topik ini diakhiri dengan studi kasus pembiayaan sebagai contoh dari pembiayaan daerah.

B. Latar Belakang

Dinamika permasalahan pembangunan daerah yang semakin cepat menyebabkan tuntutan masyarakat pada pelayanan pemerintah juga semakin besar. Kondisi ini harus mendorong pemerintah dalam hal ini aparat daerah untuk terus meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kemampuan manajemen maupun kemampuan teknis yang lebih baik. Reformasi pemerintahan dan persaingan antar negara harus

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini dapat terselesaikan. Modul ini digunakan didalam Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kompetensi peserta di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan didalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Proses perencanaan dan penganggaran pada prakteknya melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan. Peran serta masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menampung berbagai masukan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Proses perencanaan tersebut dituangkan dalam UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri 54/2010.

Tindak lanjut fase perencanaan adalah proses penganggaran yang melibatkan banyak pihak baik DPRD maupun SKPD. Berbagai usulan program dan kegiatan perlu ditampung dan disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan. Proses koordinasi dan sinkronisasi diatur dalam PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 jo Permendagri 21/2011. Terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sedikit banyak telah mewarnai modul perencanaan dan penganggaran daerah ini.

Kami menyadari bahwa modul ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dalam penyempurnaan modul ini sehingga bisa menjadi acuan semua pihak terutama aparat pemerintah daerah.

Akhir kata, kami sangat berharap modul ini dapat bermanfaat terutama bagi peserta diklat guna meningkatkan kompetensinya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang turut mendukung dan memberikan saran dan arahan di dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, November 2014

Tim Penulis



Supported by:



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPO)



LPPM UB
Lembaga Penelitian Dan
Pengabdian kepada Masyarakat
UNIVERSITAS BRAWIJAYA